

## **Participatory Communication in Community Empowerment: A Study of Sociocultural Traditions**

**Doni Darmasetiadi <sup>\*1)</sup>, Rufus Goang Swaradesy<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

\*Email Penulis Korespondensi: doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id

**Abstrak.** Komunikasi partisipatif adalah dialog terbuka yang dapat diterapkan pada kegiatan pemberdayaan. Prinsip-prinsip komunikasi partisipatif meliputi dialog, suara, pedagogi pembebasan, dan tindakan-refleksi-tindakan. Selain itu, bentuk komunikasi partisipatif meliputi heteroglossia, dialogis, polifoni, dan karnaval. Komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungannya, sehingga memenuhi berbagai kebutuhan. Komunikasi partisipatif merupakan bentuk implementasi tradisi sosial budaya karena berbagai asumsi dan kriterianya saling berhubungan. Esensi komunikasi partisipatif dalam tradisi sosial budaya adalah dialogis, di mana interaksi adalah konstruksi sosial, bukan masalah aktor yang terlibat. Interaksi ini bergantung pada peran dan norma yang berlaku, sehingga membentuk makna dan budaya tertentu di tingkat mikro dan makro.

**Kata kunci:** Komunikasi partisipatif; pemberdayaan; tradisi sosial budaya

**Abstract.** Participatory communication is an open dialogue that can be applied to empowerment activities. The principles of participatory communication include dialogue, voice, liberating pedagogy, and action-reflection-action. Furthermore, forms of participatory communication include heteroglossia, dialogic, polyphony, and carnival. Participatory communication in empowerment is part of an effort to meet the needs of each individual, group, and society in general, so that they can make choices and control their environment, thereby fulfilling various needs. Participatory communication is a form of sociocultural tradition implementation because its various assumptions and criteria are interconnected. The essence of participatory communication within the sociocultural tradition is dialogic, where interaction is a social construct, not a matter of the actors involved. This interaction relies on prevailing roles and norms, thus shaping specific meanings and cultures at the micro and macro levels.

**Keywords:** Participatory communication; empowerment; sociocultural tradition

### *Article History :*

*Received 12-11-2025; Revised 25-11-2025; Accepted 24-12-2025*

## PENDAHULUAN

Di masa kini, berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial kian rumit di beragam lokasi. Perubahan iklim, kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan urbanisasi merupakan beberapa faktor yang memengaruhi perubahan kehidupan publik (2023, Alif Iman Mansyur, FitrianiPrimanda Kiky Widyaputra, Ade Putra Ode Amane, Zainal Abidin & Yusuf Adam Hilman, Nur Rahmawati & Amin Rais, James Sinurat, Rianto, Ahmadin, 2021). Dalam menghadapi situasi yang terus berubah ini, pemberdayaan masyarakat semakin diterapkan sebagai cara untuk meraih pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kondisi globalisasi saat ini telah mewujudkan keterhubungan antar negara dan masyarakat dunia yang sebelumnya tidak terbayangkan (Ahmadin et al., 2023). Perkembangan teknologi informasi, khususnya akses cepat dari internet mengubah cara manusia dalam mengakses informasi. (Misbawati, 2021). Perkembangan ini perlu menjadi ini peluang bagi setiap individu untuk melakukan pembaruan di berbagai bidang.

Selain itu, perubahan zaman juga mengubah praktik pemberdayaan masyarakat untuk semakin berkesinambungan dan tidak eksklusif. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya individu maupun kelompok masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dan sumber daya untuk mewujudkan partisipasi aktif dalam pembangunan sesuai masalah ekonomi, politik, dan sosial yang dihadapi (Suhaeb et al., 2022). Partisipatif mengacu pada kata partisipasi yang memiliki makna keikutsertaan atau kontribusi dalam sebuah kegiatan. Partisipasi individu dalam kelompok atau pun masyarakat akan selalu terdapat keterlibatan proses komunikasi. Pernyataan ini selaras dengan opini (Mefalopulos, 2003) dalam (Misbawati, 2021), yakni *Communication was addressed of stakeholders throughout the communication for development strategic process allows for local and cultural specificities and prespective to be include in the design, testing and implementation of communication strategies.*

Pendapat diatas menegaskan bahwa komunikasi memiliki fungsi sebagai penghubung diantara individu, pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan dan mengubah perilaku. Proses ini disebut sebagai komunikasi partisipatif. Verhangen (Zulkarnain, 2021) menjelaskan partisipasi bermakna bentuk spesifik dari komunikasi dan interaksi yang berhubungan dengan kewenangan, manfaat, dan tanggung jawab. Komunikasi partisipatif dilandasi dengan kognisi individu atau masyarakat, yang berarti kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan dengan rasa percaya diri, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat dimaknai cara mendukung setiap individu berkaitan beragam sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri, dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kelompok mereka (Ife, 2002). Konsep ini menekankan bahwa aktivitas dari para anggota perlu memberikan dampak positif kepada kehidupan mereka.

Praktik komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat juga ditentukan terhadap kondisi sosiokultural kelompok atau kelembagaan mereka. Hal ini dapat dirasakan dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi sosiokultural dari kelembagaan berfokus pada

kemampuan membangun makna dan interpretasi bersama yang dibangun dalam hubungan dan berdampak pada operasional organisasi (Littlejohn, Stephen et al., 2017). Komunikasi partisipatif dapat memahami struktur organisasi dari percakapan yang muncul dalam kesehariannya.

Dengan demikian, penjelasan diatas menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif termasuk upaya yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi partisipatif dapat diterapkan dengan asumsi-asumsi tradisi sosiokultural. Hal ini dapat menjamin kelancaran kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut Zed (2004) dalam (Syafitri, 2020) menyatakan bahwa riset kepustakaan maupun dikenal dengan studi pustaka, dipahami sebagai untaian proses mengenai metode mengumpulkan data kepustakaan, memahami, menulis, dan mengelola bahan penelitian (Syafitri, 2020). Selain itu, Prastowo (2012) dalam (Syafitri, 2020) penelitian kepustakaan adalah cara riset kualitatif dimana kajiannya di pustaka, seperti arsip dan berbagai dokumen lainnya.

Artikel ini ditulis selama November 2025 secara luring karena tidak membutuhkan data lapangan. Inti dari tulisan ini adalah pengumpulan tinjauan pustaka tentang keterkaitan konsep komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat yang kemudian ditinjau dari tradisi sosiokultural.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, khususnya yang membahas komunikasi partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan tradisi sosiokultural. Penulis mengevaluasi berbagai referensi dan studi terdahulu yang membahas ketiga konsep tersebut. Penulis mengaitkan konsep komunikasi partisipatif dan keterkaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pemetaan hubungan antara tema, konsep, dan praktik yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan implementasi. Temuan dari analisis ini digunakan untuk menyusun kerangka utama yang menyoroti keterkaitan konsep komunikasi partisipatif dengan asumsi-asumsi tradisi sosiokultural. Akhirnya, ulasan literatur disusun secara terpadu untuk menciptakan kesinambungan antar bagian dalam pembahasan masing-masing konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Komunikasi Partisipatif**

Komunikasi partisipatif dalam pembangunan didefinisikan selaku komunikasi akan derajat “akar rumput”, yaitu komunikasi yang melibatkan partisipasi dari semua masyarakat dalam program pembangunan sesuai pendapat Nair dan White 2004; Bessette 2007 dalam (Febri Palupi Muslikhah, Sarwititi Sarwoprasodjo, 2022) . Komunikasi partisipatif cukup signifikan dalam mewujudkan perubahan sosial yang tidak eksklusif, berkelanjutan, dan berakibat positif. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan dari berbagai

pihak, berdialog secara terbuka, kerja sama, memberdayakan masyarakat, dan pengembangan kapabilitas mereka (Hoof, 2016), (Ahmadi, Mubarak, 2023). Komunikasi partisipatif merupakan komunikasi yang bertumpu pada kemampuan berdialog untuk menyelesaikan masalah (Fitriani & Rachmawati, 2023). Penyelesaian masalah ini termasuk dalam mengubah perilaku dan pengambilan keputusan.

Tufte dan Mefalopulos (2009) dalam (Sutowo, 2020) menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi partisipatif adalah sebagai berikut:

#### 1. Dialog

Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan tidak dibatasi, yang memungkinkan terjadinya diskusi mengenai isu-isu sosial dan ekonomi, termasuk ketimpangan dan ketidakadilan. Melalui dialog, strategi komunikasi dapat dikembangkan secara fleksibel. Dialog yang dimaksud mengharuskan adanya perhatian penuh dan kemampuan mendengarkan secara aktif, dengan minat yang tulus terhadap topik yang sedang dibicarakan.

#### 2. Suara (Voice)

Prinsip suara berkaitan dengan penyampaian aspirasi, serta kesadaran akan perlunya ruang bagi masyarakat—khususnya kelompok yang terpinggirkan—bertujuan menyampaikan opini dan keluhan masyarakat. Posisi media dapat berperan media menjadi fasilitator yang membantu kelompok-kelompok tersebut agar dapat menyampaikan kekhawatiran dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

#### 3. *Liberating Pedagogy*

Menurut Freire, komunikasi dialogis harus mampu menciptakan ruang dialog baik di lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan utamanya adalah agar solusi terhadap permasalahan dapat ditemukan dan informasi tetap tersampaikan secara efektif. Pendekatan ini berlandaskan pada empat nilai utama: kasih sayang, kerendahan hati, kepercayaan, dan harapan. *Liberating Pedagogy* tidak hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi, tetapi juga mendorong terbentuknya dialog yang mampu mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi yang tepat, yang pada akhirnya mendorong tindakan kolektif yang membebaskan.

#### 4. Aksi-Refleksi-Aksi

Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan nyata sebagai respons terhadap masalah yang telah dikenali dalam suatu kelompok. Komunikasi partisipatif mendorong kesadaran dan komitmen untuk bertindak bersama. Kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kepemilikan dan komitmen pada persoalan dengan dihadapi secara kolektif.

Sementara, menurut Rahim (2004) dalam (Satriani, P., Muljono, R. W. E., 2011) terdapat empat bentuk utama dalam komunikasi partisipatif, yakni heteroglasia, dialogis, polifoni, dan karnaval. Berikut penjelasannya:

### 1. Heteroglasia

Heteroglasia menekankan kegiatan pengembangan akan melibatkan keberagaman kelompok dan komunitas berlatar belakang berbeda, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut juga tercermin dalam tingkat partisipasi pembangunan, di mana setiap peserta memiliki karakteristik yang unik, termasuk dalam penggunaan bahasa dan penyampaian pesan.

### 2. Dialogis

Pembahasan komunikasi partisipatif tidak akan terlepas dari konsep komunikasi Pembangunan konvensional menjadi komunikasi partisipatif horizontal. Dalam pendekatan dialogis, komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima pesan, seperti dalam forum atau rapat yang dipimpin oleh seorang fasilitator. Esensi dari prinsip ini adalah penghargaan terhadap perbedaan pendapat antar peserta, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pandangannya.

### 3. Polifoni

Polifoni menggambarkan bentuk dialog yang paling tinggi, di mana berbagai suara yang awalnya terpisah dan tidak seragam dapat saling terbuka, saling melengkapi, dan membentuk pemahaman yang lebih utuh. Tidak ada suara yang mendominasi atau menutupi yang lain, sehingga tercipta komunikasi yang inklusif dan transparan.

### 4. Karnaval

Proses ini merujuk pada bentuk komunikasi yang berlangsung secara informal, sering kali diselingi dengan humor, tawa, dan suasana santai. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup berbagai ekspresi budaya seperti parodi, hiburan, festival, dan cerita rakyat, yang menjadi bagian dari dinamika komunikasi partisipatif yang lebih cair dan merakyat.

Slamet dalam (Yulianti, 2012) menyatakan jika komunikasi partisipatif memiliki sejumlah jenjang dalam hal tahapan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari *idea planning stage*, *implementation stage*, dan *utilization stages*. *Idea planning stage* mengutamakan pada pelibatan individu maupun warga berkaitan pendapat dalam suatu diskusi tentang kegiatan. *Implementation stage* adalah individu atau masyarakat berpartisipasi pada kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, semisal kontribusi uang, tenaga dan lainnya. *Utilization stage* berhubungan dengan kontribusi individu dan atau warga melalui pemberian tenaga maupun uang guna mengoperasionalkan dan memelihara hasil proyek pembangunan.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sugiarto, Secara konsep, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Istilah ini merujuk pada peningkatan kapasitas individu, terutama mereka yang tergolong rentan dan lemah, agar memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal:

- (a) Memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga memperoleh kebebasan, tidak hanya dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga terbebas dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit;
- (b) Mengakses sumber daya produktif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan
- (c) Terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah proses menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu mengembangkan diri, menentukan arah masa depan, serta berkontribusi dan berpengaruh dalam kehidupan komunitasnya (Suharto, 2014).

World Bank (2001) dalam (T. dan S. Mardikanto, 2013) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lainnya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pandangan yang diungkapkan oleh (Zimmerman, 2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dikategorikan menjadi tiga level, yaitu: level individu, level organisasi, dan level masyarakat. Pada level individu, pemberdayaan memfokuskan pada hal-hal seperti: pembelajaran yang bertujuan meningkatkan keterampilan dalam membuat keputusan, kemampuan untuk mengelola sumber daya, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Di tingkat organisasi, proses ini berupaya untuk meningkatkan kemungkinan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, serta kepemimpinan yang saling mendukung. Sementara itu, di tingkat masyarakat, pemberdayaan ditujukan pada tiga aspek utama, yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, terciptanya struktur pemerintahan yang lebih transparan, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Indikator dari Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga hal sebagai berikut (Dwidjowijoto, Nugroho, R., Wrihatnolo, & R, 2007):

- a) Akses, dimaknai dalam konteks kesederajatan bahwa hak dalam mengakses sumberdaya yang produktif pada suatu lingkungan;
- b) Partisipasi, adalah kontribusi dalam menggunakan aset maupun sumber daya yang terbatas;
- c) Kontrol, yakni kesederajatan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang terbatas;
- d) Manfaat, ialah setiap individu harus mendapatkan hak yang adil dalam pemanfaatan sumber daya terbatas maupun pembangunan .

### **C. Tradisi Sosiokultural**

Salah satu tradisi pada komunikasi adalah adanya hubungan yang saling memengaruhi antara komunikasi manusia dan budaya di mana disebut sebagai tradisi sosiokultural. Fortman dan Giles dalam (Baldwin, J.R, Faulkner S. L, Hecht M. L, dan Lindsley, S, 2006) menjelaskan bahwa meskipun komunikasi merupakan suatu perilaku yang merupakan pertukaran informasi dan pemahaman yang dimaknai bagi setiap individu, namun juga oleh pertukaran sebelumnya yang pernah terjadi. Transformasi informasi yang sudah ada akan membentuk struktur pengalaman yang menjadi bagian dari budaya dan tatanan sosial tertentu. Oleh karena itu, komunikasi berdasar dengan latar belakang sosiokultural (struktur sosial tertentu), dan di satu sisi, komunikasi juga menentukan upaya individu berinteraksi di masa yang akan datang (Eko Nugroho, 2019). Proses ini disebut dengan reproduksi sosial yang berkelanjutan pada struktur sosial sehingga mewujudkan menciptakan pemahaman baru dan mendialektikannya lagi.

Tradisi sosiokultural sebagai bentuk adanya reproduksi struktur sosial. Perbedaan dalam kerangka budaya memengaruhi makna yang berbeda dan pada akhirnya menghasilkan interpretasi yang bervariasi tentang sesuatu. Interaksi kemudian mengubah perbedaan tersebut, tentu saja melalui proses komunikasi yang mendalam.

Komunikasi adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan makna dan menciptakan interaksi. Melalui proses ini, reproduksi pada struktur sosial akan terus terjadi. Hal ini menjadikan setiap individu memahami konteks lingkungan komunikasinya. Keutamaan dari proses komunikasi adalah bukan hanya tindakan individu, namun juga melibatkan keberadaan masyarakat, kelompok, organisasi, maupun bangsa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsep masyarakat tidak mungkin ada tanpa adanya peristiwa komunikasi yang menjadi awalnya (Robert T. Craig, 2007). Di sisi lain, komunikasi tidak dapat terjadi tanpa didahului pola makna dan tindakan yang terkait dengan massa.

Tradisi Sosiokultural memiliki beberapa asumsi meliputi (Littlejohn, Stephen et al., 2017):

- a) Cara kita mengerti, makna, norma, peran, dan aturan saling berhubungan dalam proses berkomunikasi.
- b) Tradisi ini menjelaskan mengenai dunia interaksi, di mana setiap orang hidup dengan pemahaman bahwa realitas tidak dimaknai sebagai sekumpulan aturan yang objektif di luar diri kita, melainkan suatu realitas sosial yang terwujud dalam proses komunikasi.
- c) Fokusnya mengarah pada pola interaksi ketimbang sifat individu. Dalam hal ini, pokok permasalahannya terletak pada interaksi di tingkat mikro, sehingga pembahasan mengarah pada terjadinya fenomena komunikasi yang berkembang secara lebih luas. Secara makro, bentuk komunikasi akan mewujudkan ide-ide besar, semisal makna, masyarakat, dan budaya.
- d) Tradisi ini menarik minat tentang praktik komunikasi dalam konteks konkret atau nyata. Tradisi ini pemikiran dan bahasa. Pemikiran dipahami sebagai proses internalisasi dari akumulasi pengalaman masa lalu dan melakukan pengelompokan yang kemudian menciptakan kategori simbolik. Sedangkan, bahasa dimaknai sebagai

simbol-simbol dengan aturan tertentu untuk melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Masa lalu hanya menjadi tumpukan yang kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, masa lalu tidak mempengaruhi pembentukan bahasa, atau bahasa tidak terpengaruh oleh masa lalu (yang nyata), melainkan dipengaruhi oleh proses berpikir yang berkaitan dengan masa lalu. Ini adalah konsep berpikir dalam konteks sekarang (J.M., 2007).

#### **D. Keterkaitan Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Komunikasi partisipatif merupakan proses komunikasi dua arah yang transparan, di mana komunikator dan komunikan saling berkomunikasi secara terus menerus dalam penyelesaian akan masalah, termasuk dalam mengubah perilaku dan pengambilan keputusan. Aktivitas ini disertai dengan rasa saling meyakini diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut (T. Mardikanto, 2010). Penerapan komunikasi ini akan jelas terlihat dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Aprillia Theresia, Krishna S Andini, Prima GP Nugraha, 2014) pemberdayaan dimaksudkan dengan cara mengoptimalkan kemampuan warga (miskin dan marjinal) untuk mampu mengutarakan opini, dan atau keperluan, opsi-opsinya, berdiskusi, berkontribusi, menentikan dan mengoperasionalkan instansi masyarakat dengan akuntabel demi peningkatan kualitas kehidupannya. Pendapat ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipasi akan selalu diterapkan pada pengelolaan kelembagaan-kelembagaan di mana pemberdayaan masyarakat berlangsung. Proses berlangsungnya ini bergantung pada bagaimana komunikasi partisipasi dilakukan oleh semua anggota dalam kelembagaan tersebut.

Praktik komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat akan terlibat dalam dari tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Khusus dalam level organisasi, komunikasi partisipatif akan terlihat dikarenakan pengelolaan organisasi berusaha mewujudkan pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan kepemimpinan yang saling mendukung.

Dalam level organisasi dari pemberdayaan masyarakat juga akan terlihat penerapan prinsip-prinsip dari komunikasi partisipatif meliputi:

##### **1. Dialog**

Proses komunikasi partisipatif berprinsip pada pengiriman pesan secara terbuka selama kegiatan pemberdayaan masyarakat berlangsung pada level organisasi. Hal ini akan mewujudkan memudahkan proses pengambilan keputusan karena penyampaian pesan tidak dibatasi, yang memungkinkan terjadinya diskusi mengenai isu-isu yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Arnst (1996) dalam (Chitnis, 2005) yang menjelaskan bahwa proses dialogis dapat membantu kebutuhan mereka dan memenuhi dengan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan menciptakan pengetahuan baru. Proses dialogis pada kelembagaan tersebut dapat dikembangkan secara fleksibel dengan syarat semua anggota harus memahami jalannya

komunikasi, yakni kemampuan antara mengirim pesan dan menerima pesan harus seimbang. Hal inilah yang menjadikan para anggota aktif dalam berorganisasi.

Menurut Bakhtin (1984) dalam (Syarah & Rahmawati, 2017) menjelaskan prinsip dialog melebihi tingkat percakapan biasa, mengutamakan hubungan daripada pertukaran informasi biasa. Dialogisme dapat terjadi secara inheren dalam segala jenis komunikasi. Dalam hal ini dialogisme adalah percakapan yang memiliki arti dan pengiriman value-value tertentu. Unsur produksi makna terdiri atas: faktor formal linguistik, diksi dan kalimat, konteks sosial dan fisik.

## 2. Suara (Voice)

Prinsip suara (voice) berkaitan dengan penyampaian aspirasi, serta kesadaran akan perlunya ruang bagi masyarakat—khususnya kelompok yang terpinggirkan—untuk menyuarakan pendapat dan permasalahan mereka selama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Prinsip suara atau *voice* sebagai suatu bentuk nilai dan pengertian untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah selama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, suara atau *voice* dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi serta aksi sosial. Pendapat pertama menganggap bahwa suara atau *voice* ini berhubungan dengan perihal keterwakilan dan agensi. Sedangkan, pandangan berikutnya menyatakan bahwa “suara” berkaitan dengan isu penerimaan, kederaajatan, dan pengakuan, kesetaraan, dan politik berbasis identitas (Lawy, 2017). Selanjutnya, suara juga dapat dipahami sebagai kemampuan kebebasan berekspresi (freedom of expression) (Jati, 2022).

## 3. Liberating Pedagogy

Menurut Widiastono (2005) dalam (Robikhah, 2018) menjelaskan bahwa *liberating pedagogy* adalah upaya yang disadari oleh seorang individu agar sadar dengan kondisi sekelilingnya.. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dialogis harus tanpa paksaan sehingga memunculkan ruang lingkungan internal dan eksternal selama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, *liberating pedagogy* tidak hanya memfasilitasi aspirasi, namun juga dapat mendorong dialog untuk melahirkan persoalan dan merumuskan solusi yang tepat selama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses ini juga mendorong tindakan kolektif yang tepat. Tindakan kolektif dipahami sebagai upaya gabungan dari kelompok yang bertujuan untuk mencapai posisi yang lebih baik untuk kelompoknya sendiri maupun untuk mencapai tujuan kolektif (Benartin & Alfian, 2023). Hal ini menandakan bahwa komunikasi dialogis terjadi di dalam dan luar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu selama kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 4. Aksi-Refleksi-Aksi

Prinsip ini adalah proses dialektis di mana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya menekankan pentingnya tindakan nyata sebagai respons terhadap masalah yang telah dikenali dalam suatu kelompok Freire (1999) dalam (Moenawar et al., 2019). Nama lain dari prinsip ini adalah konsietintasi. Prinsip ini menekankan bahwa Komunikasi partisipatif mendorong kesadaran dan komitmen untuk bertindak bersama. Pada akhirnya

pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi secara kolektif.

Selain prinsip-prinsip diatas, terdapat bentuk-bentuk komunikasi partisipatif, yakni:

#### 1. Heteroglasia

Konsep ini menekankan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan keberagaman kelompok dan komunitas yang *setting* berbeda. Perbedaan ini juga tercermin dalam tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat, di mana setiap peserta memiliki karakteristik yang unik, termasuk dalam penggunaan bahasa dan penyampaian pesan. Sebagai contoh adalah heteroglosia dari komunikasi partisipatif warga Kampung Lampion Code 18 yang memiliki keberagaman kondisi sosial. (Shafira & Dasrun Hidayat, 2022). Contoh kedua pada penelitian dengan judul “The Dynamics of Communal Participatory Communication in the Anticipation of COVID-19 Pandemic on WhatsApp Group Media” proses heteroglassia ditandai dengan keragaman latar belakang anggota grup WhatsApp, dengan variasi pekerjaan, usia, budaya yang tinggal bersama dalam satu kawasan atau kompleks tempat tinggal (Kartikawati, 2021). Contoh berikutnya, yakni komunikasi partisipatif diantara para relawan pemadam kebakaran dalam forum Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Kota Bengkulu, memiliki heteroglasia dengan latar belakang berbeda dari jumlah anggota lebih dari 400 orang, seperti perbedaan jenis kelamin, umur, dan sebagainya (Nabila Nur Syafitri, Yulianti, 2024). Contoh terakhir adalah Komunikasi partisipatif sebagai kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran di mana heteroglesia menunjukkan bahwa komunitas/relawan bencana di Kabupaten Pangandaran bermanfaat dalam melakukan tujuan utama mereka. Kondisi ini didahului dengan adanya limitasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya, kelompok-kelompok tersebut saling melengkapi keterbatasan masing-masing (Bakti et al., 2023).

#### 2. Dialogis

Bentuk dialogis adalah di sini mirip dengan prinsip dari komunikasi partisipatif di mana dialogis menjadi proses komunikasi partisipatif berprinsip pada pengiriman pesan secara terbuka selama kegiatan pemberdayaan masyarakat berlangsung pada level organisasi. Hal ini akan mewujudkan memudahkan pengambilan keputusan karena penyampaian pesan tidak dibatasi, yang memungkinkan terjadinya diskusi mengenai isu-isu yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Arnst (1996) dalam (Chitnis, 2005) yang menjelaskan bahwa proses dialogis dapat membantu kebutuhan mereka dan memenuhi dengan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan menciptakan pengetahuan baru.

Dalam pendekatan dialogis, komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima pesan, seperti dalam forum atau rapat yang dipimpin oleh seorang fasilitator. Esensi dari prinsip ini adalah penghargaan terhadap perbedaan pendapat antar peserta, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pandangannya. Sebagai ilustrasi pada warga Kampung Lampion Code 18 di mana aspek dialogis dipahami dengan transaksi informasi antara warga dengan ketua daerah dalam forum diskusi (Shafira & Dasrun

Hidayat, 2022). Berikutnya adalah kajian tentang dinamika komunikasi partisipatori komunal dalam mengantisipasi Pandemi Covid-19 dalam grup media WhatsApp yang dimaknai dengan upaya mengetahui dan menghormati setiap suara dalam proses komunikasi agar terhindar dari bahaya Virus Covid-19. Setiap anggota mengekspresikan opini dan berpartisipasi dalam interaksi untuk menanyakan berbagai pertanyaan, memberikan opini dan keluhan, hingga pada akhirnya jika menghadapi permasalahan akan diselesaikan secara bersama-sama (Kartikawati, 2021). Berikutnya, para relawan pemadam kebakaran di Kota Bengkulu beraspek dialogis dalam konteks komunikasi partisipatif diwujudkan dalam forum diskusi antara REDKAR Kota Bengkulu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Kedua pihak ini juga memberdayakan masyarakat dengan sosialisasi cara penanganan dan pencegahan kebakaran (Nabila Nur Syafitri, Yulianti, 2024). Contoh terakhir komunikasi partisipatif sebagai kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran, memiliki bentuk komunikasi partisipatif berupa dialogis adalah proses komunikasi dilakukan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan para pemangku kepentingan dengan menyepakati keputusan dengan peran masing-masing sebelum mengambil keputusan akhir untuk bertindak (Bakti et al., 2023).

### 3. Polifoni

Polifoni menggambarkan bentuk dialog yang paling tinggi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, di mana berbagai suara yang awalnya terpisah dan tidak seragam dapat saling terbuka, saling melengkapi, dan membentuk pemahaman yang lebih utuh. Tidak ada suara yang mendominasi atau menutupi yang lain, sehingga tercipta komunikasi yang inklusif dan transparan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bentuk ideal dari komunikasi partisipatif terletak dengan terwujudnya aspek polifoni di mana keragaman opini secara menyeluruh yang ditandai dengan operasional konstruksi umum dari kelompok diskusi yang ada. Implementasi polifoni dibangun dari suatu proses dialogis sehingga kebebasan opini dapat dikeluarkan (Syarah & Rahmawati, 2017).

Sebagai contoh masyarakat Kampung Lampion Code 18 memiliki aspek polifoni merupakan saat pertemuan dilakukan, maka peserta dapat mengemukakan opini tanpa batasan apa pun (Shafira & Dasrun Hidayat, 2022). Contoh kedua pada penelitian dinamika komunikasi partisipatori komunal dalam mengantisipasi Pandemi Covid-19 dalam grup media WhatsApp, proses polifoni ditunjukkan dengan dalam proses dialog tidak ada saling intervensi dan dominasi dalam mengekspresikan ide, saran, maupun kritik, sehingga polifoni terbentuk secara ideal dalam proses komunikasi partisipatif ini (Kartikawati, 2021). Berikutnya, aspek polifoni yang dilakukan para relawan pemadam kebakaran berupa musyawarah mufakat menjadi landasan REDKAR Kota Bengkulu, seluruh pendapat akan ditampung dan didengarkan tanpa memandang adanya pihak yang lebih dominan, sehingga setiap orang memiliki kesetaraan dalam memberikan pendapat tanpa adanya intervensi (Nabila Nur Syafitri, Yulianti, 2024). Contoh terakhir komunikasi partisipatif sebagai kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran, memiliki bentuk komunikasi partisipatif polifoni berupa diskusi secara

terbuka diantara komunitas maupun relawan untuk menyampaikan tugas mereka, termasuk upaya mengedukasi masyarakat dalam hal menghadapi bencana (Bakti et al., 2023).

#### 4. Karnaval

Proses ini merujuk pada bentuk komunikasi yang berlangsung secara informal, sering kali diselingi dengan humor, tawa, dan suasana santai. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup berbagai ekspresi budaya seperti parodi, hiburan, festival, dan cerita rakyat, yang menjadi bagian dari dinamika komunikasi partisipatif yang lebih cair dan merakyat. Sebagai contoh komunikasi partisipatif pada masyarakat Kampung Lampion Code 18, proses karnaval diwujudkan pada acara 17 Agustus-an. Meskipun sebatas kirab sejauh Jalan Malioboro, namun warga Kampung Lampion Code tetap antusias mempersiapkannya. Perencanaan dimulai dari konsep, kostum, dan sebagainya (Shafira & Dasrun Hidayat, 2022). Contoh kedua pada penelitian dinamika komunikasi partisipatori komunal dalam mengantisipasi Pandemi Covid-19 dalam grup media WhatsApp, proses polifoni ditunjukkan dengan dalam proses karnaval ditunjukkan dengan upaya untuk membangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan dengan meningkatkan kesadaran terhadap situasi di sekitar lingkungan tempat tinggal, serta segera melaporkan hal-hal yang dianggap berbahaya bagi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan Covid-19. Selanjutnya, komunikasi diantara para relawan pemadam kebakaran di Kota Bengkulu juga mewujudkan aspek karnaval berupa interaksi anggota REDKAR Kota Bengkulu secara kekeluargaan dengan sangat erat. Proses komunikasi terjadi secara langsung, yakni saling bercanda (Nabila Nur Syafitri, Yulianti, 2024).

#### E. Komunikasi Partisipatif: Tinjauan Tradisi Sosiokultural

Komunikasi partisipatif adalah suatu dialog terbuka dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam segala level, termasuk level organisasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga mengkonstruksi situasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan keberlanjutan kelembagaan tersebut.

Proses komunikasi partisipatif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan tradisi sosiokultural organisasi. Hal ini terjadi karena kegiatan pemberdayaan masyarakat sering dilakukan melalui partisipasi organisasi yang ada.

Keterkaitan antara komunikasi partisipatif dengan tradisi sosiokultural dimulai dengan komunikasi memiliki hubungan saling mempengaruhi antara manusia dan budaya. Komunikasi dimaknai sebagai kegiatan atau perilaku yang esensinya adalah pertukaran informasi yang akan menjadi budaya dan tatanan sosial tertentu. Komunikasi partisipatif bergantung pada latar belakang budaya dan struktur sosial tertentu mempengaruhi cara memahami dan mempengaruhi orang di dalam kelompok. Proses ini adalah reproduksi sosial yang terus berlangsung untuk membentuk pemaknaan masing-masing individu dan tindakan komunikasi yang kemudian mendialektikannya secara sosial. Penerapan komunikasi partisipatif berkaitan dengan tradisi sosiokultural, yakni:

a) Dalam berkomunikasi secara partisipatif yang berisikan dialog di dalam kelompok akan bergantung dengan norma, peran, aturan, dan makna.

Proses partisipasi bergantung pada norma dan makna. Proses dialog dalam kelompok akan menyesuaikan norma, peran, aturan dan menghasilkan makna tertentu. dapat berkaitan dapat dilihat dari beberapa kajian, seperti “Analisis Kelembagaan Petani Dalam Meningkatkan Produksi Kentang di Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo” adalah rendahnya tingkat implementasi norma melalui program-program masih rendah dikarenakan tingkat komunikasi partisipasinya juga rendah (Ginting & Sitti Hazzah Nur. R, 2025). Selain itu, keterkaitan antara norma dan partisipasi juga diketahui dalam kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat kelurahan Kumpulrejo dengan basis agrowisata di Kota Salatiga. Dalam penelitian itu keterkaitan antara norma dan partisipasi diketahui dari modal sosial dimana banyaknya pelanggaran norma berhubungan dengan rendahnya partisipasi dari anggota kelembagaan di Kelurahan Kumpulrejo (Rahayu Rafikahwulan Sari, Royke Robert Siahainenia, 2020).

b) Tradisi ini memandang komunikasi partisipatif sebagai perwujudan tentang dunia interaksi.

Setiap orang hidup dengan pemahaman bahwa realitas bukanlah sekumpulan aturan yang objektif di luar diri para aktor, melainkan suatu realitas sosial yang terwujud dalam komunikasi kelompok dan budaya. Sebagai contoh kajian yang berjudul “Interaksi Sosial Anggota Kelompok Tani dan partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan pertanian di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru” dijelaskan bahwa proses komunikasi antaranggota dikategorikan tinggi hal ini diikuti keterlibatan para petani dalam proses edukasi juga tinggi yang menimbulkan situasi yang kondusif (Sidebang et al., 2021). Selain itu, contoh dari praktik komunikasi partisipatif dalam konteks ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian dari “Hubungan Dinamika Kelompok dengan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali”. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi dalam kelompok tersebut sedang, namun peneliti mendapatkan temuan bahwa jika bertambahnya intensitas komunikasi diantara anggota, maka semakin tinggi ketertarikan kelompoknya. Hal ini disebabkan para anggota kelompok yang selalu berkomunikasi, maka akan tingkat minat untuk bersinergi sehingga menentukan kualitas partisipasi anggota kelompok itu (Siburian et al., 2023).

c) Fokusnya lebih pada komunikasi partisipatif menjadi bagian dari pola interaksi daripada sifat individu atau model mental.

Tradisi ini sangat melihat proses interaksi dibandingkan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Hal ini dikarenakan interaksi yang diawali pada level mikro, yakni interaksi antarindividu. Proses interaksi ini berkembang pada level yang besar seperti kelompok atau organisasi dan seterusnya sehingga membentuk budaya dan makna tersendiri.

Sebagai contoh pada kajian “Efektivitas Jaringan Komunikasi Kelompok Ibu – Ibu PKK Dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Program Kelestarian Lingkungan di Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian menunjukkan jaringan komunikasi yang terbentuk menunjukkan karakteristik yang relatif terpusat. Hal tersebut ditandai dengan adanya peran dua aktor yang memiliki peran sentral dalam melakukan penyebaran informasi, menghubungkan antar anggota dan membentuk koordinasi. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan aktor sentral sebagai pendorong menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan merata. Melalui pemahaman struktur jaringan komunikasi tersebut, partisipasi anggota dalam program kelestarian lingkungan (Efendi & Kurniawan, 2025). Contoh kedua adalah Kajian “Pola Interaksi Sosial Komunitas Otaku Japan Freak UIN dalam Membangun Solidaritas Sosial” dijelaskan bahwa pola interaksi sosial antar anggota berhasil membentuk solidaritas berupa gotong royong (Tiara Ramadhantika & Abdul Rozak, 2024). Kesamaan terhadap minat tertentu menjadikan berjalannya komunitas lebih kolektif melalui pembahasan yang pemaknaan yang menarik diantara para anggota.

- d) Tradisi ini sangat tertarik untuk meneliti komunikasi (seperti komunikasi partisipatif) dalam praktik yang nyata.

Tradisi ini memperhatikan fenomena komunikasi yang dapat membedakan antara pemikiran dan bahasa. Hasil pemikiran dibentuk dari pengalaman yang kemudian diceritakan lewat bahasa tertentu. Sebagai contoh kajian yang berjudul “Pengalaman Keikutsertaan dalam Kelompok Pendukung Ibu untuk Meningkatkan Pemberian ASI Eksklusif” yang menunjukkan pengalaman dalam keaktifan mengikuti Kelompok Pendukung (KP) melalui bahasa yang mudah dipahami (Supadmi et al., 2020). Selain itu, kajian “Analisis Potensi Kapasitas Lokal Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan” yang menjelaskan bahwa aspek pengetahuan para petani karena memiliki berpengalaman dalam melakukan budidaya dan penyuluhan pertanian. Pengalaman tersebut dinarasikan untuk menggambarkan potensi kelembagaan petani di Kabupaten Humbang Hasundutan (Mulyani et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa komunikasi partisipatif memiliki akan selalu diterapkan pada pengelolaan kelembagaan-kelembagaan di mana kegiatan pemberdayaan masyarakat berlangsung. Proses berlangsungnya pemberdayaan masyarakat bergantung pada komunikasi partisipasi dilakukan oleh para anggota dalam kelembagaan tersebut. Praktik komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat memiliki sejumlah prinsip, meliputi dialog, suara (voice), liberating pedagogy, dan aksi-refleksi-aksi. Sedangkan, bentuk-bentuk dari komunikasi partisipatif, meliputi: heteroglasia, dialogis, polifoni, dan karnaval. Selanjutnya, komunikasi partisipatif dapat diterapkan dalam tradisi sosiokultural karena berbagai asumsi kriterianya saling berhubungan. Esensi dari komunikasi partisipatif dengan tradisi sosiokultural adalah dialogis yang menjadi interaksi sebagai konstruksi sosial

bukan pada aktor-aktor yang terlibat. Interaksi ini bergantung pada peran dan norma yang berlaku sehingga pada level mikro hingga makro membentuk makna dan budaya tertentu.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Mulawarman yang telah mendukung penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih banyak kepada pihak Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang juga mendukung keterlaksanaan penulisan karya tulis ilmiah ini.

#### REFERENSI

- 2023, Alif Iman Mansyur, FitrianiPrimanda Kiky Widyaputra, Ade Putra Ode Amane, Zainal Abidin, B. N. P., & Yusuf Adam Hilman, Nur Rahmawati & Amin Rais, James Sinurat, Rianto, Ahmadin, G. (2021). *Sosiologi Perkotaan* (ISBN:978-623-459-304-4 & E. D. Cetakan 1, Eds.; 1st ed., Vol. 32, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ahmadi, Mubarak, T. T. G. (2023). Strategi Komunikasi Partisipatif Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2, 35–44.
- Ahmadin, A., Nugroho, L., Sari, E. J., Mustopa, M., Hasbi, I., Islam, N., Kurniawan, A., Jermias, E. O., Dey, N. P. H., Rahman, A., Putra, A. E., Amane, A. P. O., Subandi, Y., & Djumaty, B. L. (2023). Sosiologi Ruang Virtual. In Ahmadin (Ed.), *Cv Widina Media Utama* (1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Aprillia Theresia, Krishna S Andini, Prima GP Nugraha, T. M. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (1st ed.). Alfabeta.
- Bakti, I., Zubair, F., & Budiana, H. R. (2023). Participatory communication as the key to successful disaster management in Pangandaran district. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(2), 195. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i2.49785>
- Baldwin, J.R, Faulkner S. L, Hecht M. L, dan Lindsley, S, L. (2006). *Redefining Culture Perspectives Across the Disciplines*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Benartin, G. P., & Alfian, I. N. U. R. (2023). Scoping Review: Tindakan Kolektif Dalam Konteks Media Sosial. *Artikel Penelitian*.
- Chitnis, K. (2005). The Duality of Development: Recasting Participatory Communication for Development Using Structuration Theory. *Journal of Integrated Agricultural Socio-Economics and Entrepreneurial Research (JIASEE)*, 13, 228–249.
- Dwidjowijoto, Nugroho, R., Wrihatnolo, & R, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.

- Efendi, A. S., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas Jaringan Komunikasi Kelompok Ibu–Ibu PKK Dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Program Kelestarian Lingkungan di Kabupaten Lamongan. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 14–22.
- Eko Nugroho. (2019). Teoritisasi Komunikasi Dalam Tradisi Sosiokultural. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 236–253. <https://doi.org/10.21009/communicology.012.09>
- Febri Palupi Muslikhah, Sarwititi Sarwoprasodjo, D. S. (2022). Komunikasi Partisipatif pada Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. *Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik*, 2, 1196–1208. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i2.777>
- Fitriani, L. R., & Rachmawati, D. (2023). Komunikasi Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Kampung Ulos dalam mengembangkan Ulos sebagai Upaya Revitalisasi. *Warta ISKI*, 5(2), 156–167. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v5i2.183>
- Ginting, A. H. B., & Sitti Hazzah Nur. R. (2025). Kelembagaan Petani Dalam Meningkatkan Produksi Kentang Di Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 67–75. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v3i01.20996>
- Hoof, K. van. (2016). *Communication for Development One-year master 15 Credits Communication & Implementation for Social Change: Mobilizing knowledge across geographic and academic borders.*
- Ife, J. (2002). *Community development: Creating community Alternatives – Vision, Analysis and Practice.*
- Jati, W. R. (2022). Revitalisasi Voice sebagai Hak Politik Warga Kota di Indonesia: Suatu Kajian Konseptual. *Jurnal HAM*, 13(3), 429. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.429-444>
- J.M., C. (2007). *Symbolic Interactionism; an Introduction, an Interpretation, an Integration 9th Edition.* Pearson Prentice Hall.
- Kartikawati, D. (2021). The Dynamics of Communal Participatory Communication in the Anticipation of COVID-19 Pandemic on WhatsApp Group Media. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 65–81. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v13i1.1941>
- Lawy, J. R. (2017). Theorizing voice: Performativity, politics and listening. *Anthropological Theory*, 17(2), 192–215. <https://doi.org/10.1177/1463499617713138>
- Littlejohn, Stephen, W., A.Foss, K., & Oetzel, J. G. (2017). Theories of Human Communication Eleventh Edition. In *Waveland Press, Inc.* (Vol. 53, Issue 95).
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). UNS Press.
- Mardikanto, T. dan S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Alfabeta.
- Mefalopulos, P. (2003). *Theory and Practice of Participatory Communication: The Case of The FAO Project “Communication for Development in Southern Africa.”* 1–206.

- Misbawati, M. (2021). Bisnis Online: Peluang dan Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 5(1), 27–33.
- Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. (2019). Consciousness Raising Dan Partisipasi Politik Suku Baduy Di Era Digital (Tinjauan Awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 69–80. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.69-80>
- Mulyani, P. W., Dwi Febrimeli, Yuliana Kansrini, Yusra Muharami Lestari, & Hamdan. (2024). Analisis Potensi Kapasitas Lokal Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(2), 114–127. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.858>
- Nabila Nur Syafitri, Yulianti, D. D. P. (2024). Komunikasi Partisipatif Relawan Pemadam Kebakaran dalam Menanggulangi Kebakaran di Kota Bengkulu. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 8(2), 89–102. <https://doi.org/10.51544/jlkm.v8i2.5546>
- Rahayu Rafikahwulan Sari, Royke Robert Siahainenia, S. S. H. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Kelurahan Berkelanjutan Berbasis Agrowisata di Kumpulrejo, Kota Salatiga. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(2), 187–201. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.187-201>
- Robert T. Craig, H. L. M. (2007). *Theorizing Communication Readings Across Traditions*. Sage Publications.
- Robikhah, A. S. (2018). Paradigma Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 1–16. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.3>
- Satriani, P., Muljono, R. W. E., L. (2011). *Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 kelurahan Situgede, Kecamatan bogor Barat, Kota Bogor*. 9(2).
- Shafira, A. L., & Dasrun Hidayat. (2022). Community Participatory Communication Lampion Village In Maintaining Yogyakarta Cultural Identity. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 63–69. <https://doi.org/10.21070/kanal.v10i2.1674>
- Siburian, S. C., Padmaningrum, D., & Suwanto. (2023). Hubungan Dinamika Kelompok Dengan Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. *Journal of Integrated Agricultural Socio Economics and Entrepreneurial Research*, 2(1), 27–34.
- Sidebang, V. S., Mariani, M., & Yulianti, M. (2021). Interaksi Sosial Anggota Kelompok Tani dan Partisipasi Petani dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Frontier Agribisnis*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v5i2.6029>
- Suhaeb, F. W., Ahmadin, Novita Sari, D., & Kaseng, E. S. (2022). The Obstacles of Elementary School Teachers for Applying Effective and Fun Learning in The New Normal in Selayar Islands Regency. *SHS Web of Conferences*, 149, 01043. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901043>

- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). PT Refika Aditama.
- Supadmi, P., Nisman, W. A., & Hapsari, E. D. (2020). Pengalaman Keikutsertaan dalam Kelompok Pendukung Ibu untuk Meningkatkan Pemberian ASI Eksklusif. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 3, 165–172. <https://doi.org/10.32419/jppni.v3i3.167>
- Sutowo, I. R. (2020). Komunikasi partisipatif dalam pengembangan kewirausahaan sosial di pandeglang, banten. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.33021/exp.v3i1.885>
- Syafitri, E. R. dan W. N. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling “ Dialectical Behavior Therapy.” *Jurnal BK UNESA*, 11, 53–59.
- Syarah, M. M., & Rahmawati, M. (2017). Komunikasi Partisipatori Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan TB. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, XVII(2), 250–257.
- Tiara Ramadhantika, & Abdul Rozak, N. S. N. (2024). *Pola Interaksi Sosial Komunitas Otaku Japan Freak Uin dalam Membangun Solidaritas Sosial*. 6(2), 140–154.
- Yulianti, Y. (2012). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*.
- Zimmerman, M. A. (2000). *Handbook of Community Psychology* (E. S. Julian Rappaport, Ed.). Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Zulkarnain, K. M. R. (2021). *Pemberdayaan Wirausaha Santri Pondok Pesantren Sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat* (B. A. Laksono, Ed.; 1st ed.). CV. Bayfa Cendekia Indonesia.